

# **SATIRE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PROTES AKSI DEMONSTRASI #TOLAKOMNIBUSLAWCIPTAKERJA ((Studi Kasus: Aksi Demonstrasi Penolakan Omnibus Law di Bali Pada Oktober 2020))**

**Windha Putri Billyantari, Ketut Putra Erawan, Gede Indra Pramana**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [windhabilly26@gmail.com](mailto:windhabilly26@gmail.com), [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id), [indraprama@unud.ac.id](mailto:indraprama@unud.ac.id)

Abstrak

*Poster memiliki peranan penting dalam aksi demonstrasi. Berbeda dengan aksi demo pada masa lampau, demonstrasi sekarang diwarnai dengan pembawaan poster dengan kalimat satire yang ditujukan kepada target poster. Tulisan didalam poster menjadi focus persoalan, ketika makna sebenarnya ditujukan kepada target hingga mampu melampaui batasan semestinya. Bagaimana satire mampu menjadi suatu kritik untuk menyerang hegemoni berkuasa dengan mengandalkan kata-kata. Demo terkait penolakan omnibus law cipta kerja yang disahkan oleh pemerintah menjadi titik bagaimana penulis ingin menginterpretasikan poster sebagai media komunikasi protes terhadap pemerintah. Beragam poster dari berbagai kalangan masyarakat yang dipamerkan dimedia sosial Instagram membuat partisipasi masyarakat terhadap isu semakin meningkat. Teori kritik hegemoni Antonio Gramsci dan metode analisis semiotika Roland Barthes memegang peranan penting pada kajian penelitian ini untuk menafsirkan makna pada poster. Penelitian ini berjenis kualitatif, didukung dengan teknik pengumpulan data observasi non-partisipatif, studi pustaka dan wawancara.*

*Kata Kunci: Satire, Kritik Hegemoni, Analisis Semiotika, Instagram*

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang memunculkan tagar #TolakOmnibusLawCiptaKerja pada saat aksi turun kejalan, sosial media maupun artikel online yang berafirmasi menjadi suatu gerakan sosial. #TolakOmnibusLawCiptaKerja sejatinya

adalah suatu aspirasi masyarakat terkait penolakan terkait kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memihak kepada masyarakat atau lebih tepatnya kaum buruh/pekerja.

Omnibus Law sudah tandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, namun pengesahan

tersebut menuai kontroversi yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang menuai perdebatan. Ada klaster dengan beberapa poin yang menjadi pembahasan yakni: Penyerderhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, Kawasan Ekonomi.

Pada aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja terdapat hal unik yang menarik atensi dari masyarakat maupun penulis yakni penggunaan satire untuk menyampaikan aspirasi oleh mahasiswa, kelompok dan juga beberapa masyarakat. Penggunaan satire yang dituangkan kedalam poster, social media dan juga artikel menjadi pembeda dengan aksi demonstrasi dimasa lampau. Penggunaan satire sendiri diminati oleh para demonstran karena banyaknya respon dari masyarakat yang ikut merespon tulisan satire saat aksi demonstrasi berlangsung. Pemahaman Gramsci tentang hegemoni sangat penting untuk membaca politik sindiran karena menyoroti alternatif (yaitu kontra-hegemoni). Satir politik adalah contoh khas dari kontra-hegemoni ini, karena tujuan utamanya adalah untuk menumbangkan wacana resmi. Sindiran politik secara

sistematis mengolok-olok propaganda dengan menciptakan wacana kontra-hegemonik dan menunjukkan sisi sebaliknya, sehingga mengurangi kekuasaan diktator di mata masyarakat.

Pada penelitian ini, akan meneliti lebih jauh mengenai pengalihan makna tanda yang terkandung dalam poster yang digunakan pada aksi demonstrasi penolakan omnibus law cipta kerja ditinjau dengan analisis semiotik Roland Barthes dengan mengkaji tanda verbal dan juga visual yang terdapat didalam poster itu sendiri sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terdapat juga makna eksplisit dan implisit didalam poster ini atau yang disebut dengan *two order of signification* yakni denotasi dan konotasi.

Media sosial turut memberikan peran penting terhadap jalannya aksi demonstrasi, karena menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media sosial Instagram contohnya, menyebarluaskan gambar terkait tulisan satire dan mendapat banyak respon dari masyarakat hingga *public figure*.

Dalam penelitian ini penulis ingin memahami satire sebagai sindiran politik yang merupakan metode perlawanan kepada kelompok hegemoni yang berkuasa. Analisis terhadap isu, argument simbolisme dan juga bahasa yang digunakan dalam poster yang terdapat di sosial media menawarkan gaya baru

terhadap perlawanan kaum subaltern atau kelompok terpinggirkan kepada kelompok berkuasa dengan menggunakan metode satire.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka, penulis membagi kedalam dua sub-bab yang dimana memiliki perbedaan pembahasan namun membantu penulis dalam penulisan penelitian ini. Pada sub-bab yang pertama yakni Kritik Sosial dalam Balutan Humor Satire sedangkan pada sub-bab kedua yaitu Peranan Media Baru yang dimana pada sub-bab pertama memuat tiga penelitian terdahulu sedangkan sub-bab kedua memuat satu kajian terdahulu.

Dalam penelitian yang berjudul "*Challenging Hegemony: Nurhadi-Aldo and the Election in Indonesia*" (Journal of Contemporary Asia) mengkaji mengenai ketidakpuasan masyarakat kelas bawah akan pertarungan politik saat kampanye pemilu 2019 yang mengangkat isu agama dan nasionalisme.

Pada penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Gramsci mengenai akal sehat yang berhubungan dengan bahasa. Konsep Gramsci menunjukkan bahwa memang ada yang meliputi bahasa, akal sehat yang dimiliki oleh mayoritas luas dari formasi sosial antar kelas, konsep yang diterima begitu saja. Bahasa moral agama dan nasionalisme itulah sikap baku ekspresi

politik Indonesia. Nurhadi-Aldo sering kali menyampaikan aspirasi masyarakat kelas bawah dengan cara yang ironi. Ironi satire digambarkan dalam meme yang ditujukan untuk menolak konservatisme agama yang terdapat pada meme. Konsep filsafat spontan Gramsci tercermin dalam seni spontanitas meme Nurhadi-Aldo. Mereka memanfaatkan budaya populer dan komunikasi (meme) serta humor untuk mengekspresikan keprihatinan politik. Nurhadi-Aldo mengungkapkan ketidakpuasan secara simbolis dalam meme, tetapi meme ini merujuk pada masalah sehari-hari yang konkret mahasiswa muda perkotaan dan kelompok terpinggirkan seperti petani dan buruh.

Dalam penelitian Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi yang berjudul "Analisis Semiotika Kritik Sosial dalam Balutan Humor pada Komik Faktap" (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 17 No 1 Juni 2020) melihat bahwa kritik social dapat disampaikan melalui media baru. Kritik disampaikan oleh media yang berupa komik strip yang dibagi menjadi dua kategori yakni kritik terhadap anggota DPR RI dan kritik terhadap kebijakan DPR RI.

Pesan-pesan yang terkandung didalam satire memiliki tujuan untuk menyerang seseorang atau suatu instansi yang dirasa tepat untuk diserang. Namun penyerangan ini tidak dimaksudkan pada penyerangan fisik tetapi menggunakan

symbol sebagai media atau wadah bagi si pembuat pesan maupun pembaca pesan itu sendiri. Pesan didalam satire menggunakan humor yang diartikan sebagai senjata untuk menyerang musuh namun bisa menghibur bag yang lainnya. Menggunakan satire dianggap bisa melampaui batas-batas social yang ada di masyarakat serta menyediakan ruang terbuka untuk mengkritisi otoritas yang berbasis kekuasaan.

Penelitian dalam Jurnal Publikasi Media dan Cinema yang berjudul “Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Kasus RUU Cipta Kerja” (Jurnal PIKMA, Volume 3 No2, Maret 2021) melihat bahwa media sosial sebagai media baru telah bergeser dari yang sekedar media sekunder, kemudian bertransformasi menjadi media primer yang dapat mempengaruhi sendi kehidupan warga negara (kewargaan). Media saat ini merupakan saluran yang paling signifikan untuk transmisi pesan yang merupakan situs-situs di mana politik dan kehidupan publik ditata, situs-situs tersebut memiliki makna-makna kehidupan publik dihasilkan, diperdebatkan dan dievaluasi. Selain itu, kita hidup di dunia yang dimediasi; “Kehidupan masyarakat yang dimediasi” menunjukkan jenis hubungan sosial antara tokoh masyarakat dan masyarakat, karena masyarakat tidak sering bertemu langsung dengan politisi

dan masalah publik, tetapi menilai citra media, representasi, dan cerita tentang para politisi dan isu-isu publik tersebut. Dalam upaya mereproduksi pemahaman dominan tentang isu dan peristiwa, media sebagai institusi pengolahan pengetahuan atau pengetahuan berhasil membuat masalah sosial terlihat oleh publik

## **2.1 TEORI KRITIK HEGEMONI**

Istilah hegemoni merupakan sebuah konsep pemikiran oleh seorang pemikir sosial berkebangsaan Italia yakni Antonio Gramsci. Pemikiran Gramsci lahir dari pemikiran Marx dan juga Lenin yang dimana Gramsci membuat asumsi marx mengenai material, kelas dan peranan perjuangan kelas dan kesadaran dalam perubahan sosial peranannya dalam mengeksplorasi pemikiran Marx pada tema hegemoni borjuis dalam masyarakat sipil seperti yang terangkan oleh Marx dan Engels dalam *German Ideology* dan mengolahnya menjadi hegemoni menurut versinya tentang bekerjanya sistem kapitalis.

Kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yani “*eugemonia*” yang dimana diterapkan untuk menunjukan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*city states*) secara individual. Dalam pengertiannya, hegemoni menunjukan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota dengan negara-

negara lain yang berhubungan terintegrasi dalam negara terpimpin.

## **2.2 PERSPEKTIF *NEO-GRAMSCI* DAN BUDAYA POPULER**

Budaya populer berasal dari analisis politik salah satu tokoh Marxis di Italia yakni Antonio Gramsci terlebih lagi mengenai pengembangan teori hegemoninya. Gramsci menggunakan istilah hegemoni yang merujuk kepada kelompok-kelompok dominan pada suatu sistem atau masyarakat melalui proses kepemimpinan sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Budaya populer juga sering disebut dengan perspektif neo-gramscian yang menganggap budaya sebagai media perlawanan suatu kelompok subordinasi terhadap kelompok dominan. Perspektif neo-gramscian berlandaskan pemikiran oleh Karl-Marx, dimana perspektif ini menolak cara ortodoks yang sering digunakan untuk menginterpretasi Karl-Marx yaitu sebagai konsep mekanis, positivistik dan materialistic, dimana cara ini beranggapan bahwa perkembangan ekonomi tidak diikuti oleh perubahan sosial. Namun sebaliknya, neo-gramscian melihat bahwa perubahan sosial yang muncul adalah konsekwensi dari perubahan pikiran dan tingkah laku masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan kesadaran sosial yang

disebabkan oleh actor-aktor tertentu. Oleh karena itu, perspektif neo-gramscian perjuangan politik atau ideologis dilakukan untuk memunculkan kesadaran bersama (*common sense*).

Pemahaman Gramsci tentang hegemoni sangat penting untuk membaca politik sindiran karena menyoroti alternatif (yaitu kontra-hegemoni). Kontra-hegemoni dihasilkan oleh kesepakatan yang disetujui secara bersama dan bukan sebuah sistem koersif (pemaksaan) yang bertujuan untuk mengontrol media. Gramsci dan kisah hegemoninya, bergerak maju untuk diskusi budaya populer, seperti yang telah diperiksa oleh ahli teori budaya populer yang lebih baru, yang menunjukkan elemen “konflik” budaya populer, perannya dalam mengorganisir kesadaran populer, dan akhirnya kemungkinan perubahan bukan sebagai perubahan radikal dari struktur, tetapi sebagai proses perubahan yang sedang berlangsung di tingkat mikro-politik. Jadi, disisi lain, sindiran politik dapat menggambarkan bentuk perlawanan dan konflik langsung dengan sistem dominan, tetapi di sisi lain, proses perubahan lebih berkembang pada tingkat mikro-politik, meninggalkan struktur sistem kekuasaan yang lebih besar. Satir politik sebagai intelektual populer memainkan peran penting dalam pemahaman politik.

## **2.3 Satir Politik Sebagai Kontra Hegemoni**

Satir politik adalah contoh khas dari kontra-egemoni ini, karena tujuan utamanya adalah untuk menumbangkan wacana resmi. Analisis Gramsci tentang hegemoni memberi kita dua mekanisme penting yang secara signifikan berkontribusi pada pembentukan 'proyek' hegemoni perang posisi dan perang manuver. Satir politik, sebagai 'proyek kontra-hegemonik', secara sistematis beroperasi sebagai perang posisi, karena secara halus merendahkan wacana resmi dengan mengungkapkan aspek-aspek lemah dari rezim tersebut dan bukan dengan benar-benar menghadapi basis bawah rezim tersebut. Perang posisi menandakan adanya gerakan perlawanan di kalangan masyarakat sipil yang menentang homogenisasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih untuk menganalisis poster yang digunakan pada aksi penolakan omnibus law cipta kerja adalah analisis semiotik yang melihat komunikasi tidak hanya sebagai proses mengirim pesan, namun juga menitik beratkan pada produksi dan pertukaran pesan yang memperhatikan bagaimana pesan/teks berinteraksi dengan komunikan yang dapat menghasilkan makna.

Semiotika merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan rahasia teks dan penandaan, karena semiotika merupakan

puncak logis dari apa yang disebutkan oleh Derrida sebagai *Logocentrisme* budaya Barat.

Menurut Li, semiotika menyangkut makna melalui *sign* (tanda) yang dimana menurut Barthes, tanda merupakan gabungan dari *signifier* dan *signified*. Pada penelitian ini, akan meneliti lebih jauh mengenai pengalihan makna tanda yang terkandung dalam poster yang digunakan pada aksi demonstrasi penolakan omnibus law cipta kerja ditinjau dengan analisis semiotik Roland Barthes dengan mengkaji tanda verbal dan juga visual yang terdapat didalam poster itu sendiri sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Analisis semiotik menurut Barthes tidak hanya menganalisis mengenai penanda dan petanda, tetapi juga menganalisis makna secara denotatif dan konotatif. denotasi menjelaskan hubungan antara *signified* dan *signifier* atau diartikan tanda dengan rujukan kepada realitas sehingga menghasilkan makna eksplisit atau pasti. Sedangkan konotasi adalah petandaan yang menjelaskan hubungan *signifier* dan *signified* yang didalamnya terdapat makna implisit atau tidak pasti (memiliki segala kemungkinan).

Analisis semiotika dengan prinsip *two order of signification* dapat dikelompokkan sebagai turunan dalam kerangka kerja denotasi dan konotasi. Denotasi adalah *order of signification* yang

pertama yang pada tingkatan ini terdapat *signifier* dan *signified*. Dalam maknanya, denotasi merupakan apa yang kita pikirkan dan bersifat tetap. Sedangkan konotasi adalah *order of signification* yang kedua yang memiliki perubahan makna secara asosiatif.

**Bagan 3.1 Model Analisis Semiotika dengan Signifikasi Dua Arah**

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (petanda)
3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER (PENANDA KONOTATIF)	5. CONNOTATIVE SIGNIFIED (PETANDA KONOTATIF)
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)	

Sumber: Bagan Semiotika Roland Barthes; Sobur (2004)

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 GAMBARAN UMUM**

Awal pada bab IV penelitian ini yakni pembahasan mengenai objek kajian. Penelitian ini berjudul “Satire Sebagai Media Komunikasi Protes Dalam Aksi #TolakOmnibus LawCiptaKerja (Studi Kasus: Poster Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Bali Pada Media Sosial Instagram)” maka objek penelitiannya adalah poster yang digunakan pada aksi demonstrasi terjadi. Namun poster yang menjadi objek penelitian merupakan poster yang diunggah di media sosial Instagram dilihat dari *tags* pada nama pengguna (*username*) @balitidakdiam. Lebih dalam, penulis menyoroti beberapa poster yang dianggap penting untuk dipahami dan

diteliti mengenai makna didalamnya. Diantaranya poster tersebut ditentukan berdasarkan beberapa isu yang dibahas yakni upah minimum pekerja, investasi, pengenaan sanksi, dan yang paling banyak menjadi target satire adalah oknum pemerintah yang membuat kebijakan omnibus law cipta kerja.

**4.2 IMPLEMENTASI HEGEMONI PADA PENGESAHAN OMNIBUS LAW**

Undang-undang Omnibus Law menuai protes dalam tuntutan keadilan oleh masyarakat sebagai suatu keputusan politik. Omnibus Law sebagai produk oligarki yang meligitimasi atas buruh yang memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan negara ini. Omnibus law yang tidak memiliki urgensi lebih penting dibandingkan urusan pandemic Covid-19, tatkala disahkan dengan keadaan Indonesia yang kala itu masih dirundung pandemic membuat rakyat memiliki kecurigaan yang besar terhadap UU Omnibus Law. Banyaknya kecacatan secara prosedur dan juga substansi membuktikan bahwa tindakan yang diambil elite pemerintah adalah sebuah tindakan anarkisme karena pembentukan dari UU melenceng dari etika politik dan mekanisme negara hukum.

Demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja menyebabkan UU tersebut ditinjau kembali pada Mahkamah

Konstitusi (MK), presiden mengeluarkan perpu yang dimana isi dari perpu tersebut tidak merubah secara substansi. Hal tersebut dituding sebagai siasat pemerintah untuk tetap meberlakukan Omnibus Law. Dengan digantinya omnibus law dengan perpu menguatkan cara berpikir neo-gramscian karena menganggap apa yang menjadi keputusan MK tidak menjadi halangan untuk sebuah UU omnibus law disahkan oleh pemerintah melalui perpu yang dibuat oleh presiden. Secara tidak langsung omnibus law dan perpu tersebut menjadi penanda neo-gramsci.

### 4.3 Hasil Temuan

#### 1. Poster Demonstrasi Seniman dan Aktivis Bali

Pada tanggal 6 November 2020, akun *Instagram* pribadi milik seniman Bali @gus\_dark\_art mengunggah karya seni berupa poster yang bertepatan dengan isu sosial mengenai omnibus law cipta kerja. Poster tersebut merupakan visualisasi suatu bentuk protes msyarakat khususnya seniman dengan adanya kebijakan omnibus law cipta kerja yang dirasa menguntungkan investor dan oknum pemerintah sedangkan menyengsarakan masyarakat kecil khususnya buruh/pekerja. Gambar tersebut memuat beberapa karakter hewan dan juga manusia yang memiliki peranan masing-masing. Dalam poster tersebut, terlihat

beberapa karakter hewan berargumen sambil mengenakan pakaian rapi dan membawa bendera merah putih. Sedangkan karakter manusia digambarkan dalam bentuk yang lebih kecil serta terlihat seperti rakyat kecil.

Gambar 4.1 Poster Demonstrasi Omnibus Law oleh Seniman Bali



Sumber: Akun *Instagram* @gus\_dark\_art; Poster penolakan omnibus law dengan berbagai karakter hewan dan manusia, (6 November 2020)

Poster tersebut memuat tanda verbal maupun visual yang menandakan pembuat poster kontra terhadap pasal-pasal karet yang terdapat didalamnya. Dalam analisis semiotika Roland Barthes terdapat tanda yang mengungkapkan makna yang terdapat pada suatu objek penelitian. Begitu pula poster yang dibuat oleh Gus Dark memiliki makna implisit.

“Betul sekali, ini cara saya untuk merespon UU karpas merah untuk investor hitam. Ya memang ini memiliki makna terselubung contohnya bisa kita lihat pada poster ini terdapat banyak karakter, karakter tersebut

memiliki arti. Contohnya terdapat gambar anjing disana yang kita tahu anjing melambangkan kesetiaan. Kesetiaan anjing tersebut saya artikan sebagai kesetiaan seseorang atau kelompok terhadap para kroninya yang dimana terdapat hubungan saling menguntungkan. Disana juga terapat gambar tikus yang dimana tikus. Sepertiyang kita tahu bahwa tikus adalah hewan yang suka mencuri makanan. Saya megartikan bahwa banyak oknum pemerintah yang sifat atau tabiatnya menyerupai sifat tersebut. Banyak investor hitam yang diuntungkan dengan adanya Omnibus Law, sedangkan rakyat yang seharusnya menjadi subject pembangunan hanya menjadi object pelengkap penderita dengan doktrin Nasionalisme semu tanpa pengejawentahan yang berarti.” (Wawancara Gus Dark, seniman sekaligus aktivis sosial Bali, 12 Oktober 2022).

Poster ini merupakan bentuk sindiran aktivis sosial sekaligus seniman Bali terhadap isu sosial yang dimana menurut pembuat, poster ini mampu merepresentasikan realitas atau cara pandang masyarakat terhadap pemerintah. Poster yang diunggah oleh

akun Instagram pribadi @gus\_dark\_art memiliki makna implisit, hal tersebut disampaikan langsung oleh pembuat poster sekaligus pemilik dari akun Instagram tersebut yakni Gus Dark selaku seniman juga aktivis yang aktif merespon isu sosial politik melalui karya poster. Terdapat dua kelompok karakter dengan kesamaan sikap dan gestur namun memiliki tujuan atau maksud yang berkebalikan. Kadua karakter memperlihatkan sikap nasionalis, diperlihatkan dengan pembawaan bendera pada tokoh yang berlawanan yakni tokoh binatang dan juga rakyat. Terlihat jelas bahwa karakter binatang ditujukan untuk oknum pemerintah atau elite politik, sedangkan karakter manusia yang digambarkan lebih kecil dari karakter binatang menginterpretasikan rakyat kecil yang dirugikan akibat kebijakan yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat maupun pemerintah.

## **2. Poster Demonstrasi oleh Masyarakat Lewat Sosial Media**

Poster yang terdapat pada kiriman yang menandai akun *Instagram* @balitidakdiam mengenai isu omnibus law cipta kerja tidak hanya satu atau dua poster saja, namun yang menarik perhatian penulis salah satunya adalah unggahan oleh akun @barrra23. Terlihat dalam poster tersebut, satire yang terdapat

didalamnya memiliki target dan juga makna tersirat didalamnya. Secara visual poster tersebut memperlihatkan karakteristik yang melekat pada citra oknum pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimata masyarakat.

Gambar 4.2 Poster Demonstrasi oleh Masyarakat Bali



Sumber: Akun *Instagram* @barrra23 yang menandai akun media sosial @balitidakdiam (6 Oktober 2020)

Tanda verbal yang kedua yakni 'Dewan Perwakilan Rakyat Investor' juga memiliki makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif yang terkandung yakni lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kata rakyat dicoret dan digantikan dengan kata investor yang dimana tercipta kata Dewan Perwakilan Investor. Sedangkan makna konotatif yang terdapat pada tulisan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimana seharusnya menjadi wakil dari rakyat, dengan adanya kebijakan UU Omnibus Law Cipta Kerja memperlihatkan keberpihakan terhadap investor bukan

dengan rakyat. Dibuktikan dengan adanya kejanggalan yang seakan-akan mempermudah investor dalam segala aspek dan mempersulit atau menyengsarakan masyarakat.

### 3. Poster Demonstrasi Serikat Pekerja Mandiri

Pihak yang merasa dirugikan akibat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah pihak pekerja atau buruh. Banyak kekhawatiran mengenai UU Cipta Kerja ini yakni dianggap mengamputasi hak pekerja. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) yang merupakan organisasi gabungan antara serikat pekerja di Bali, turut melakukan aksi demonstrasi dalam menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlihat dalam *posting-an* salah satu pengguna sosial media *Instagram* dengan *username* @keinarraside yang mengunggah poster yang dibawa oleh massa Serikat Pekerja Mandiri yang berlokasi di Jalan Sudirman Denpasar.

Gambar 4.3 Poster Federasi Serikat Pekerja Mandiri Bali



Sumber: Akun *Instagram* @keinarraside dalam *tags* @balitidakdiam; Potret massa membawa poster demonstrasi di Jalan Sudirman Denpasar; 8 Oktober 2020

Tulisan pada poster diatas termasuk kedalam satire jika dilihat dari karakteristiknya. Satire merupakan kritik atas perilaku individu atau kelompok yang buruk atau bodoh, hal tersebut diungkapkan penulis poster yang ditujukan kepada orang yang membuat Omnibus Law. Pada kalimat 'Omnibus hanya akal bulus bagi para penghamba fulus' memiliki niatan untuk mengolok pemerintah karena kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah adalah tindakan bodoh dan buruk yang dimana mengutamakan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan.

#### 4.4 Kendala Observasi Penelitian

Terdapat hidden fenomena yang dikaitkan dengan ketidakmauan pembuat sekaligus orang yang meng-*upload* poster untuk memberikan statement terhadap posternya dengan teori hegemoni Gramsci. Bagaimana perpe menjadi ujung tombak sehingga perdebatan tidak berlanjut. Bagaimana hegemoni membuat orang tidak mau bersuara atau memberikan statement terhadap kritik hegemoni. Terbukti saat penulis mencoba untuk menghubungi beberapa *uploader* atau pengunggah poster satire di laman sosial media Instagram. Terdapat berbagai alasan yang membuat penulis tidak bisa mendapatkan informasi mengenai ekpetaasi atau interpretasi si pengunggah poster. Bagaimana makna yang ingin disampaikan

oleh si pengunggah atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat atau pengunggah poster yang ingin disampaikan kepada penikmat poster tidak memiliki makna yang jelas, sehingga penulis dan pembaca lainnya memiliki interpretasi secara luas mengenai poster yang diunggah ke media sosial Instagram.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan poster pada aksi demonstrasi penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk dari kontra-hegemoni yang dimana bertujuan untuk mengontrol media. Poster menjadi bentuk perlawanan kepada sistem dominan untuk menumbangkan isu sosial mengenai pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kritik yang terdapat dalam poster satire muncul karena tindakan penguasa yang dianggap gagal sehingga mengakibatkan meningkatnya aktivisme politik oleh massa. Humor yang terdapat pada satir mampu memberikan rasa aman bagi kaum subaltern untuk lolos dalam kontrol sosial. Analisis terhadap isu, argument, simbolisme dan juga gaya bahasa yang digunakan didalam poster yang diteliti menawarkan gaya baru terhadap perlawanan kaum terpinggirkan kepada

kelompok penguasa dengan menggunakan metode satire.

Poster yang digunakan pada aksi demonstrasi mengangkat beberapa pokok permasalahan seperti upah minimum pekerja, investasi, pengenaan sanksi, sistem administrasi pemerintah. Namun sebagai besar poster tersebut mengarah kepada lembaga pemerintah sendiri yakni DPR selaku lembaga negara yang membuat serta mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan poster tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah relative rendah

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Day, A. (2011). *Satire and Dissent*. Indiana University Press.

Keraf, G. (2009). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan. (2001). *Semiologi Roland Barthes*. Magelang: Yayasan Indonesiatera.

McClennen, S. A. (2011). *America According to Colbert: Satire as Public Pedagogy*. America: Palgrave Macmillan.

Panuti Sudjiman, Z. (1992). *Serba-serbi semiotika / penyunting Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rakhmat, M. Z. (2021). *Neo-Gramscianism and China's Growing Roles in Indonesia*. Bogor: IPB Press.

Simpson, P. (2003). *On the Discourse of Satire*. Amsterdam: John Benjamins.

Villy Tsakona & Diana Elena Popa. (2011). *Studies in Political Humour*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Jurnal Online:

Agustin, R. D. (n.d.). Pernyataan Berbuntut Satire. *Scientia.id*. Universitas Andalas, Sumatra Barat.

Abrian, R. (n.d.). PERLAWANAN WACANA POLITIK DI DUNIA MAYA. *Kongres Bahasa Indonesia*.

Ahmad Syauqi Burhan<sup>1</sup>, M. A. (2021). ANALISIS MAKNA VISUALPADA POSTER FILM BUMI MANUSIA. *Jurnal Barik*.

Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *YAQZHAN*.

Arianto, B. (2021). Media Sosial Sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan:

- Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 107-121.
- Bahar, A. A. (2018). Fenomena Korupsi Indonesia: Perspektif Teoritik Struktural Fungsional, Analisa Kritis dalam Kerangka Dinamika Konflik Sosial Politik dan Dialektika Antara State, Political Society, dan Civil Society. *Jurnal Spektrum Komunikasi*.
- Dewi, M. K. (2017). Satire Politik dan Agama Dalam Novel The Gullivers Travels. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, 38-58.
- Duile, T. (2020). Challenging Hegemony: Nurhadi-Aldo and the 2019 Election In Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 1-26.
- Hamid, A. (2020). Analysis of the Importance of Omnibus Law Cipta Kerja in Indonesia . *International Journal of Scientific Research and Management* , 236-250.
- LI, Y. (2014). A SEMIOTIC THEORY OF INSTITUTIONALIZATION. *Academy of Management Review*.
- Luthfi, A. H. (2020). Analisis Semiotika Kritik Sosial dalam Balutan Humor pada Komik Faktap. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja.
- Praditama, A. G. (2007). IMPLIKATUR WACANA POSTER DEMONSTRASI MAHASISWA. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi. *Jurnal Humaniora*.
- Siswati, E. (2017). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Jurnal Translitera*.
- Suciartii, N. N. (2019). Analisis Bahasa Satire dalam Pertarungan Politik 2019. 1-9.
- Utomo, W. (2015). Menertawakan Politik: Anak Muda, Satire, dan Parodi dalam Situs Mojok.Co. *Jurnal Studi Pemuda*, 190-205.
- Yulianti, N. (2019). Konstruksi Isu Politik Melalui Jurnalisme Satire Di Media Online: Analisis Pemberitaan Isu #2019GantiPresiden di Mojok.Co. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 1, 14-24.

Artikel Online:

AM, U. A. (2022, Juni Selasa). *Kambing Halal, Kenapa Babi Haram? Ini Alasannya*. Retrieved from islam nu:  
<https://islam.nu.or.id/thaharah/kambing-halal-kenapa-babi-haram-ini-alasannya-sv6UW#:~:text=Artinya%2C%20%E2%80%9CUlama%20berkata%3A%20%27,dan%20sifat%20apa%20yang%20dimakannya>.

Ardianto, Y. (2019, Maret 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>:  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode->

Anggraini, A. P. (2019, Agustus 26). *Seni Perlawanan Anak Muda di Balik Poster Lucu Pendemo*. Retrieved from Kompas:  
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/26/055000365/seni-perlawanan-anak-muda-di-balik-poster-lucu-pendemo?page=all>

Ilyas, W. (2020, Oktober 4). *Omnibus Law dan Transformasi Hegemonik*. Retrieved from Halmaherapost:  
<https://halmaherapost.com/2020/10/24/omnibus-law-dan-transformasi-hegemonik/>

laili, M. (2022, April 20). *Bawa Poster Bernada Satire Saat Demo, Netizen: Instastory Berkedok Aspirasi*. Retrieved from Kumparan:  
<https://kumparan.com/miftachullaili17/bawa-poster-bernada-satire-saat-demo-netizen-instastory-berkedok-aspirasi-1xt5aYWaLth>

Prawira, A. (2020, Oktober 07). *1,3 Juta Orang Teken Petisi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja*. Retrieved from Sindo News:  
<https://nasional.sindonews.com/read/188594/12/13-juta-orang-teken-petisi-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-1602051024>

Tabelak, D. (2020, Oktober 08). *Demo Omnibus Law di Bali Ricuh, Tembakan Gas Air Mata Dibalas Batu*. Retrieved from Radar Bali:  
[adarbali.jawapos.com/bali/denpasar/08/10/2020/demo-omnibus-law-di-bali-ricuh-tembakan-gas-air-mata-dibalas-batu/](http://adarbali.jawapos.com/bali/denpasar/08/10/2020/demo-omnibus-law-di-bali-ricuh-tembakan-gas-air-mata-dibalas-batu/)

UII, S. A. (2020, Maret 12). *Pandangan dan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika FH UII atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Retrieved from <https://law.uii.ac.id/>:  
<https://law.uii.ac.id/blog/2020/03/12/pandangan-dan-pernyataan-sikap-sivitas-akademika-fh-uui->

[atas-rancangan-undang-undang-cipta-kerja/](#)

Wibisono, A. (2019, Maret 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from djkn.kemenkeu: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>